



E-journal Field of Economics, Business, and Entrepreneurship (EFEBE)

PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN DAN PEMERINTAH KOTA (STUDI KASUS PADA KABUPATEN/KOTA DI PULAU SUMATERA TAHUN 2015-2019)

Rifdah Quratunnisa¹, Ratna Septiyanti², Usep Syaipudin³, Fitra Dharma⁴

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

³ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

⁴ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

Informasi Naskah

Update Naskah:

Dikumpulkan: 12 April 2022

Diterima: 14 Mei 2022

Terbit/Dicetak: 29 Juni 2022

Abstract

The difference in financial performance between district and city governments is one of the example of high economic gap. This is due to differences in the size of an area, population density levels and different regional income which can lead to fiscal imbalances between regions. The purpose of this study is to compare the financial performance of district and municipal administrations on Sumatra Island from 2015 to 2019. This study used financial statement data for all district and city governments on the island of Sumatra and analyzed the differences using descriptive statistic methods with quantitative data analysis technique using the Mann Whitney Test. The Mann Whitney Test results revealed that there were significant differences in the ratios of independence, efficiency, operating expenditure, capital expenditure, and the degree of fiscal decentralization, but no significant differences in the effectiveness ratio between district and city governments.

Keywords:

Financial Performance, Financial ratio, Independence, Effectiveness, Efficiency, Operating Expenditure, Capital Expenditure, Degree Of Fiscal Decentralization

A. PENDAHULUAN

Pemerintah pusat memberlakukan kebijakan otonomi daerah pada saat reformasi berlangsung, khususnya UU No. 22 Tahun 1999. Pada pelaksanaannya pemerintah melakukan beberapa revisi yang mana sebelumnya dari UU No 22 Tahun 1999 menjadi UU No 32 Tahun 2004. Dalam meningkatkan otonomi suatu daerah maka pemerintah daerah melakukan pemungutan kepada masyarakat yaitu memungut pajak serta retribusi daerah. Komponen ini sangat penting karena merupakan sumber penerimaan yang sangat besar untuk mendanai kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah serta dapat meningkatkan dan memantapkan otonomi daerah. Wujud dari pelaksanaan otonomi yaitu salah satunya melalui aspek keuangan yang dapat disebut dengan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan seluruh hasil pengelolaan keuangan daerah tertuang pada hasil dari APBD yang berisi semua penghasilan dari pendapatan serta belanja yang dilakukan selama periode tersebut (Sarahagih,2003). Adanya desentralisasi fiskal ini maka pemerintah masing masing daerah mempunyai wewenang dan kebijakan masing masing agar dapat mengelola keuangannya sendiri dan dapat menggali lebih dalam sumber-sumber penerimaan sesuai potensi daerah.

Seluruh hasil pengelolaan atas keuangan daerah tertuang pada Laporan APBD yang berisikan semua hasil dari pendapatan serta belanja yang dihasilkan selama periode tersebut. Pendapatan daerah

* Corresponding Author.

Usep Syaipudin, e-mail : usep.syaipudin@feb.unila.ac.id

diperoleh melalui retribusi, pajak, serta sumber uang lain yang sah digunakan untuk mendanai pengeluaran yang seharusnya tidak lagi bergantung pada pemerintahan pusat. Namun pada kenyataannya pemerintah daerah baik kota maupun kabupaten, keduanya masih bergantung pada bantuan pendapatan dari pemerintah pusat. Tingginya ketergantungan ini menandakan belum efektifnya pengelolaan keuangan dan minimalnya pelaksanaan desentralisasi fiskal. Untuk dapat mengetahui apakah suatu daerah sudah dapat berjalan secara mandiri, efektif, efisien, dan akuntabel maka dibutuhkan penilaian kinerja atas penghasilan keuangan daerah. Penilaian atas kinerja keuangan pada pemerintah daerah ini berfungsi sebagai tolak ukur sejauh mana pendapatan daerah dapat menunjang pembiayaan pembangunan dan kegiatan daerah. Penilaian atas kinerja pemerintah daerah juga bertujuan agar masyarakat mengetahui apakah pemerintah daerah telah melaksanakan kewajiban serta apakah pengalokasian pendapatan sudah dialokasikan dengan baik. Pada studi yang dilaksanakan oleh Gilang Sofyan Purnomo *et all* yang membandingkan kinerja antara kabupaten/kota di Indonesia menjelaskan bahwa ada perbedaan dalam kemandirian, derajat desentralisasi dan belanja operasi namun tidak ada perbedaan dalam kinerja efektivitas dan belanja modal.

Tabel 1. Rincian Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah pada Kota di Pulau Sumatera Tahun 2015-2019

Tahun	Pendapatan Daerah	Belanja Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer
2015	1.057.113.704.170,26	1.084.684.058.049,42	200.084.598.622,57	856.558.737.360,32
2016	1.164.901.643.962,02	1.136.036.357.843,03	211.393.300.483,85	925.908.529.125,85
2017	1.168.044.715.885,68	1.130.099.004.945,50	264.070.215.102,09	895.331.179.773,16
2018	1.166.113.194.566,28	1.137.052.019.028,69	248.332.052.886,62	886.982.332.783,66
2019	1.291.209.806.773,20	1.238.875.039.123,70	268.534.262.608,60	975.003.180.238,50

Tabel 2. Rincian Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah pada Kabupaten di Pulau Sumatera Tahun 2015-2019.

Tahun	Pendapatan Daerah	Belanja Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer
2015	1.103.002.523.289,65	1.065.634.998.313,87	83.797.713.732,44	962.711.367.447,71
2016	1.250.258.617.782,05	1.118.002.004.835,32	89.865.343.315,62	1.114.840.262.618,59
2017	1.297.750.572.542,87	1.095.563.877.295,10	119.201.052.766,55	1.114.991.622.467,06
2018	1.303.499.361.579,31	1.086.660.095.535,94	108.259.414.029,81	1.120.518.853.358,65
2019	1.442.790.582.220,49	1.210.413.153.710,25	118.086.279.235,93	1.216.348.353.211,95

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pendapatan transfer terus memberikan pendapatan terbesar baik di kota maupun kabupaten yang menyiratkan bahwa kemandirian daerah masih terbatas, dan harus ditingkatkan lagi untuk memaksimalkan kapasitas daerah. Penerimaan transfer ke pemerintah kabupaten jauh lebih tinggi daripada ke pemerintah kota, menyiratkan bahwa pemanfaatan sumber daya dan potensi daerah oleh pemerintah kota jauh lebih unggul daripada kabupaten. Pendapatan transfer dirancang untuk menutup kesenjangan pembiayaan, tetapi jika dari tahun ke tahun PAD selalu mengalami penurunan maka pemerintah daerah tersebut belum mampu dalam menggali serta mengolah sumber keuangan lokal daerah tersebut. Selain itu perbedaan sumber daya alam, sumber daya manusia tentu akan mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah yang akan menimbulkan kesenjangan pembangunan pada masing-masing pemerintah daerah.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Hubungan keagenan mengharuskan pengalihan partisipasi dan pengambilan keputusan tertentu kepada agen yang merupakan kesepakatan antara prinsipal dan agen. (Jensen dan Meckling, 1976). Teori ini juga dapat diaplikasikan terhadap sektor publik yaitu menjelaskan adanya hubungan keagenan antara pemerintah dan masyarakat. Dalam teori ini yang menggambarkan hubungan dengan masyarakat bahwa sebagai pemangku kepentingan utama masyarakat yang berwenang untuk menilai serta mengukur kinerja dan pemerintah daerah sebagai agen yang menyediakan jasa untuk kepentingan rakyat.

Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan daerah yang memiliki kedaulatan dalam menata dan melangsungkan hajat atas satu gagasan berdasarkan kemauan rakyat. Daerah yang melakukan otonom adalah suatu daerah dengan batas wilayah yang diberi kedaulatan dalam menyelenggarakan, mengusahakan kegiatan serta kebutuhan rakyat setempat atas gagasan berlandaskan tujuan dalam kiat NKRI. Tujuan otonomi seluas-luasnya kepada daerah yaitu mempersingkat terlaksananya kedamaian pada masyarakat dengan melakukan peningkatan pada layanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat.

Teori Desentralisasi Fiskal

Salah satu bentuk penyerahan kewenangan dalam aspek keuangan yaitu dengan adanya desentralisasi fiskal. Dengan kata lain mengacu pada penyerahan kedaulatan secara fiskal dari pemerintah federal ke daerah otonom masing-masing, yang memungkinkan mereka untuk membuat keputusan dan kebijakan di tiap tiap bidangnya. Otonomi daerah serta desentralisasi fiskal dapat memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap kinerja ekonomi daerah. Oleh karenanya, pemerintah daerah harus mampu mencapai desentralisasi fiskal demi memaksimalkan kapasitasnya dengan tersedianya sumber pendapatan.

Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Bastian (2005) mendefinisikan kinerja sebagai tercapainya suatu pelaksanaan kegiatan atau kebijakan dalam mencapai tujuan dalam organisasi. Dalam menganalisis kinerja daerah dapat dilakukan teknik dengan cara menilai rasio keuangan dan kemampuan keuangan. Parameter keuangan menurut Mahmudi (2016) seperti derajat desentralisasi, kemandirian, efektivitas PAD, efisiensi, belanja operasional, dan belanja modal dapat digunakan untuk menilai kinerja daerah

C. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis data penelitian ini yaitu data sekunder yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah seluruh Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera.. Sumber data pengkajian yaitu LKPD seluruh Kabupaten dan Kota di Pulau Sumatera tahun 2015 sampai 2019 serta seluruh data-data yang berhubungan dengan pengkajian yang didapatkan dari BPK-RI.

Penentuan Sampel dan Populasi

Populasi yang terdapat pada penelitian ini yaitu seluruh komponen atas LKPD Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera tahun 2015-2019. Sampel pengkajian ini yaitu LRA pemerintah daerah kabupaten/kota di Pulau Sumatera tahun 2015-2019 yang berisi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan.

Teknik Pengumpulan Data

Data pada pengkajian ini yaitu LKPD kabupaten/kota di Pulau Sumatera Tahun Anggaran 2015-2019 serta data penting lainnya yang terkait dengan pendekatan analitis yang digunakan.

Definisi Pengukuran Variabel

1. Rasio Kemandirian Daerah

Rasio Kemandirian ialah cara menilai daerah dalam beroperasi tanpa bantuan dari luar. Apabila ketergantungan dari bantuan luar semakin rendah maka akan daerah tersebut akan semakin tinggi dalam kemandirian. Rumus rasio Kemandirian menurut Halim (2008) yaitu:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{bantuan pusat} + \text{pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 3. Kriteria Pengukuran Rasio Kemandirian

Kemampuan Keuangan	Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0%-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

Sumber: Halim (2014)

2. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas digunakan untuk menganalogikan kinerja realisasi dengan target yang ditetapkan sesuai dengan potensi masing-masing daerah. Jika rasio yang dihasilkan semakin besar maka besar kemungkinan daerah tersebut dalam mengendalikan keuangan tersebut dapat menjadi semakin efektif. Menurut Halim (2007) formulasi rasio efektivitas yaitu:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Tabel 4. Kriteria Pengukuran Rasio Efektivitas

Persentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2016)

3. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi ialah menganalogikan biaya keluar dengan realisasi pendapatan APBD untuk mengetahui seberapa efisien suatu kegiatan. Jika rasionya kurang dari 10% maka pemerintah daerah dapat dianggap sangat efisien, dan semakin kecil rasionya maka semakin efisien kinerja.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 5. Kriteria Pengukuran Rasio Efisiensi

Persentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
>40%	Tidak Efisien
31% - 40%	Kurang Efisien
21% - 30%	Cukup Efisien
10% - 20%	Efisien
<10%	Sangat Efisien

Sumber: Mahmudi (2016)

4. Rasio Aktivitas

Rasio Belanja Operasi

Secara umum, belanja operasional mencapai 60-90 persen dari belanja daerah secara keseluruhan.

$$\text{Rasio Belanja Rutin} = \frac{\text{Belanja rutin/Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Belanja Modal

Menurut Mahmudi (2010), persentase belanja modal yang diperhitungkan oleh belanja daerah berkisar antara 5% hingga 20%. Pengukuran pada rasio belanja modal dengan rumus berikut :

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

5. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Kinerja ini menunjukkan seberapa besar andil PAD pada keseluruhan pendapatan. Bertambah tinggi kontribusi PAD, bertambah tinggi pula rasio desentralisasi yang dapat dicapai oleh pemerintah daerah.

$$\text{Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 6. Kriteria Pengukuran Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Persentase PAD Terhadap TPD (%)	Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal
0,00 - 10,00	Sangat Kurang
10,01 - 20,00	Kurang
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Teknik Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Dalam penelitian ini, statistik deskriptif digunakan sebagai strategi analisis data awal. Statistik deskriptif ialah pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengkarakterisasi variabel penelitian.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas adalah uji asumsi klasik yang menguji dua set data untuk menentukan apakah data tersebut terdistribusi secara teratur atau tidak. Uji Kolmogrov-Smirnov adalah uji digunakan dalam uji normalitas penelitian ini.

3. Uji Hipotesis

1. *Independent Sample t Test*

Independent Sample t Test adalah pengujian untuk menentukan adanya perbedaan rata-rata antar kelompok sampel yang tidak berkaitan dengan asumsi bahwa data berdistribusi normal.

2. *Mann Whitney Test*

Uji Mann Whitney adalah uji statistik non-parametrik yang dapat digunakan jika uji-t dua sampel independen untuk menentukan ada tidaknya perbedaan mean dari dua sampel yang tidak dihubungkan dengan asumsi bahwa datanya tidak berdistribusi normal.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Dapat dilihat dari rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, belanja operasi, belanja modal, dan derajat desentralisasi fiskal. Hasil analisis statistik deskriptif ditunjukkan tabel berikut:

Tabel 7. Hasil Statistik Deskriptif

Rasio	Statistik Deskriptif				
	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
Kemandirian	770	1,64	91,95	11,48	10,36
Efektivitas	770	16,42	462,21	93,24	22,64
Efisiensi	770	52,62	168,96	89,63	10,05
Belanja Operasi	770	48,03	92,74	74,95	7,26
Belanja Modal	770	7,20	51,94	24,96	7,24
Derajat Desentralisasi Fiskal	770	1,61	45,96	9,30	6,43
Valid N (listwise)	770				

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS 26, 2021

Berdasarkan informasi pada tabel 7, sebanyak 770 sampel penelitian dikumpulkan selama periode lima tahun dari seluruh kota dan kabupaten di pulau Sumatera. Statistik deskriptif di atas menjelaskan hasil dari penelitian dengan variabel kemandirian, efektivitas, efisiensi, belanja operasi, belanja modal dan derajat desentralisasi fiskal.

Berdasarkan dari hasil statistik dapat diketahui bahwa rasio kemandirian memiliki nilai minimum 1,64 oleh Kabupaten Nias Selatan tahun 2016, nilai tertinggi 91,95 oleh Kota Batam pada tahun 2018, nilai rata-rata 11,48, dan standar deviasi 10,36. Dari hasil statistik deskriptif dari rasio efektivitas dapat diketahui nilai minimum yaitu sebesar 16,42 oleh Kabupaten Nias Selatan tahun 2015, nilai maksimal sebesar 462,21 oleh Kabupaten Nias Utara pada tahun 2019, mean sebesar 93,24, dan standar deviasi sebesar 22,64. Pada statistik deskripsi rasio efisiensi, dapat diketahui bahwa nilai minimum sebesar 52,62 dimiliki oleh Kabupaten Lampung Timur tahun 2017, maksimum sebesar 168,96 oleh Kabupaten Bengkalis tahun 2015, nilai mean sebesar 89,63, dan standar deviasi sebesar 10,05. Hasil statistik deskriptif pada variabel aktivitas menunjukkan bahwa untuk biaya operasional Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir memiliki nilai minimum sebesar 48,03 pada tahun 2019, Kabupaten Lampung Utara memiliki nilai maksimum sebesar 92,74 pada tahun 2019, nilai rata-rata 74,95, dan standar deviasi dari 7,26. Sedangkan hasil statistik deskriptif belanja modal dapat diketahui bahwa nilai terendah sebesar 7,20 oleh Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2019, nilai tertinggi sebesar 51,94 oleh Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016, nilai mean sebesar 24,96, dan deviasi standar sebesar 7,24. Hasil statistik deskriptif pada variabel derajat

desentralisasi fiskal dapat diketahui bahwa nilai terendah sebesar 1,61 oleh Kabupaten Nias Selatan tahun 2016, nilai tertinggi sebesar 45,96 oleh Kota Batam pada 2018, nilai mean senilai 9,30, dan standar deviasi 6,43.

Uji Normalitas

Uji normalitas ini jika data yang diuji terdistribusi normal atau signifikansinya lebih dari 0,05% maka uji hipotesis yaitu dua uji t sampel independent yang digunakan dalam pengujian hipotesis. Sedangkan jika data tidak terdistribusi secara normal atau kurang dari 0,05%, tes statistik non-parametrik digunakan, yaitu tes Whitney Man untuk menguji hipotesis. Pada tabel berikut merupakan hasil uji normalitas oleh uji Kolmogorov Smirnov:

Tabel 8. Uji Normalitas

Rasio	One Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	Sig.	Kesimpulan
Kemandirian	,000	Tidak Normal
Efektivitas	,000	Tidak Normal
Efisiensi	,002	Tidak Normal
Belanja Operasi	,000	Tidak Normal
Belanja Modal	,000	Tidak Normal
Derajat Desentralisasi Fiskal	,000	Tidak Normal

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS 26, 2021

Tabel diatas menunjukkan hasil dari seluruh variabel dalam penelitian. Data dapat dikatakan terdistribusi normal jika nilai $> 0,05$ dan sebaliknya jika data tidak terdistribusi normal jika nilai $< 0,05$. Hasil uji normalitas pada Tabel 8 menunjukkan bahwa seluruh variabel menunjukkan hasil uji kurang dari 5% yang berarti seluruh variabel dalam penelitian ini tidak terdistribusi secara normal.

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis ialah uji statistik untuk menarik ketetapan dan membuktikan kebenaran sifat populasi data sampel. Dikarenakan semua variabel tidak terdistribusi normal, maka penelitian ini menggunakan uji Mann Whitney dalam menguji hipotesis tersebut. Tabel berikut ini menunjukkan hasil pengujian hipotesis menggunakan Mann Whitney Test:

Tabel 9. Uji Hipotesis

	Uji Statistik Mann Whitney			
	Mann-Whitney U	Wilcoxon W	Z	Asymp. Sig. (2-tailed)
Kemandirian	20895,000	201195,000	-11,760	,000
Efektivitas	46457,000	60992,000	-1,775	,076
Efisiensi	18002,000	198302,000	-12,890	,000
Belanja Operasi	43650,000	223950,000	-2,871	,004
Belanja Modal	43841,000	58376,000	-2,797	,005
Derajat Desentralisasi Fiskal	19872,000	200172,000	-12,159	,000

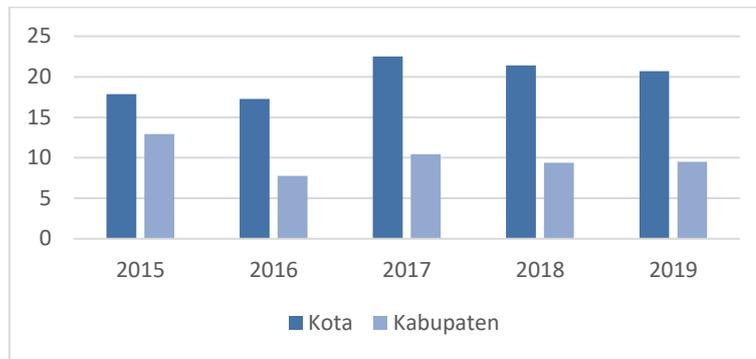
Sumber : Data diolah menggunakan SPSS 26, 2021

Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis menggunakan *Mann Whitney Test* diketahui nilai kemandirian sebesar ,000; efisiensi sebesar ,000; belanja operasi sebesar ,004; belanja modal sebesar ,005; dan derajat desentralisasi fiskal sebesar ,000. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa empat dari lima rasio tersebut $< 0,05$ artinya H_a diterima, yaitu bahwa di Pulau Sumatera adanya perbedaan rasio kemandirian, efisiensi, belanja rutin, belanja pembangunan, dan derajat desentralisasi fiskal antar kota dan kabupaten. Sedangkan hasil hipotesis efektivitas menunjukkan nilai sebesar 0,076 yang berarti $> 0,05$ maka H_a ditolak, maka bisa disimpulkan bahwa tidak ada disparitas efektivitas antara Kota/Kabupaten di Pulau Sumatera.

Diskusi dan Pembahasan

1. Perbedaan Kemandirian Kabupaten dan Kota

Hipotesis pertama menyatakan bahwa rasio kemandirian antara Pemerintah Daerah Kota dan Pemerintah Daerah Kabupaten terdapat perbedaan.

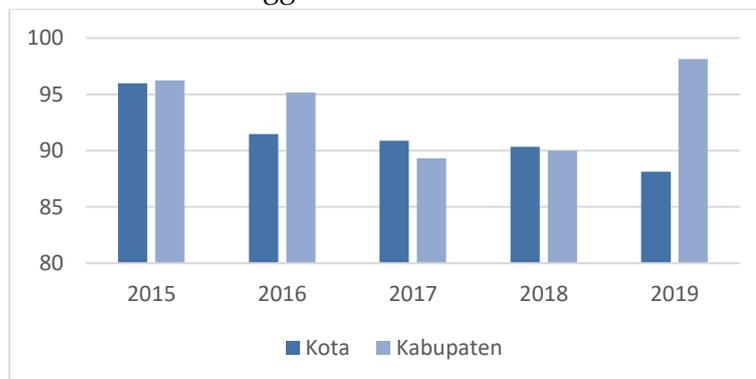


Gambar 1 Rata-Rata Rasio Kemandirian.

Berdasarkan hasil rata-rata tahunan, baik kabupaten maupun kota berada di bawah 25%, dengan suatu pola instruktif di mana alokasi pemerintah pusat lebih besar. Jika dibandingkan antara pemerintah kota dan pemerintah kabupaten menurut rata rata presentase pada tahun 2015-2019, rasio kemandirian pemerintah kota lebih tinggi yang artinya pemerintah kota jauh lebih mandiri dalam mengelola keuangan daerah dibanding pemerintah kabupaten. Besarnya kontribusi PAD menunjukkan adanya perbedaan antara kota dan kabupaten, dimana kemungkinan tingkat keterlibatan masyarakat kota dalam membayar pajak dan retribusi daerah jauh lebih tinggi ketimbang di kabupaten. Selain itu tingkat ketergantungan pemerintah kabupaten terhadap pendapatan transfer lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah kota. Tingkat ketergantungan itu sendiri berasal dari pemerintah pusat untuk menjembatani dan meminimalkan kesenjangan pembiayaan antara pusat dan daerah. Namun jika pendapatan transfer lebih besar daripada PAD maka daerah tersebut dapat dikatakan tidak mandiri yang berarti tidak dapat menggali dan mengolah lebih dalam dan lebih baik pada sumber keuangan lokal di daerah tersebut.

2. Perbedaan Efektivitas Kabupaten dan Kota

Hipotesis kedua menyatakan bahwa rasio efektivitas antara Pemerintah Daerah Kota dan Pemerintah Daerah Kabupaten terdapat perbedaan. Temuan penelitian ini dikuatkan oleh penelitian Muhammad Zulkarnain dkk, yang tidak menemukan perbedaan efektivitas antara Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh dari tahun 2014 hingga 2018.



Gambar 2. Rata-Rata Rasio Efektivitas.

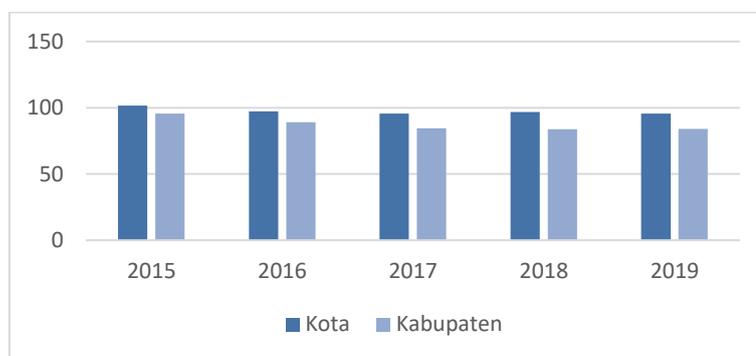
Pada rata rata rasio efektivitas tahun 2015-2019 maka berdasarkan kriteria pengukuran, baik kota maupun kabupaten masuk ke dalam kriteria cukup efektif sampai sangat efektif. Tidak terdapatnya perbedaan pada kinerja efektivitas PAD dikarenakan realisasi PAD yang diterima dan anggaran PAD yang ditargetkan baik di pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten tidak jauh berbeda. Hal ini menandakan bahwa baik pemerintah kota dan pemerintah kabupaten dapat memungut pajak dan retribusi yang dapat memberikan kontribusi PAD jauh lebih besar daripada yang dianggarkan sehingga dapat memberikan efektivitas pada keuangan daerah. Selain itu faktor lainnya yaitu baik pemerintah kabupaten dan pemerintah kota mengusulkan untuk anggaran daerah agar lebih rendah agar realisasi lebih mudah tercapai sesuai dengan target.

Namun pada tahun 2019, rata-rata rasio efektivitas antara kota dan kabupaten cukup terlihat perbedaannya. Hal ini dikarenakan beberapa daerah di kota mengalami penurunan realisasi PAD

dibandingkan tahun sebelumnya. Contohnya pada Kota Tanjung Balai dengan efektivitas sebesar 59,83% dimana efektivitas keuangan daerah tersebut rendah dimana alasan utama dikarenakan anggaran yg direncanakan dengan realisasi pemungutan PAD berbeda, contohnya pada retribusi daerah dimana ada anggaran yang direncanakan dengan realisasi pada pungutan tersebut tidak sesuai rencana sehingga tidak efektif dalam mengelola keuangan. Selain itu juga dikarenakan lain lain pendapatan yang sah mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 47,65%. Sedangkan pada pemerintahan di kabupaten pada tahun 2019 mengalami peningkatan efektivitas, contohnya seperti pada Kabupaten Nias Utara dengan nilai efektivitas sebesar 462,21%. Alasan terbesar dalam hal ini disebabkan karena target yang diusulkan sangat rendah sehingga realisasi yang didapat menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Selain itu juga dikarenakan PAD tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 15,01%. Tingginya realisasi PAD ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan dari lain-lain PAD yang sah sebesar 9,68% dan pajak daerah yaitu 87,45%.

3. Perbedaan Efisiensi Kabupaten dan Kota

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa rasio efesiensi antara Pemerintah Daerah Kota dan Pemerintah Daerah Kabupaten terdapat perbedaan. Temuan penelitian ini mendukung penelitian Tuti Meutia (2021) bahwa terdapat perbedaan efisiensi antara Pemerintah Kota Langsa dan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, dimana Kota Langsa memiliki rasio efisiensi keuangan yang lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Aceh Timur.



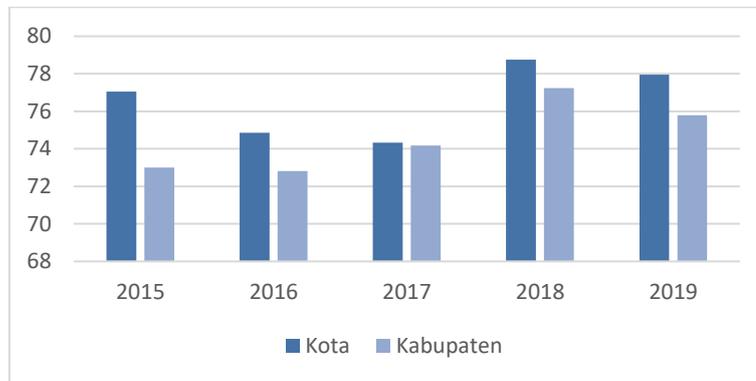
Gambar 3. Rata-Rata Rasio Efisiensi.

Berdasarkan kriteria pengukuran pada rata rata rasio efesiensi pertahun maka dapat kita lihat bahwa kota dan kabupaten masuk pada kriteria tidak efisien yaitu dengan nilai lebih dari 40%. Baik kabupaten maupun kota berdasarkan kriteria pengukuran keduanya sama sama tidak efisien, namun jika dibandingkan maka pemerintah kabupaten lebih efisien dibandingkan pemerintah kota. Perbedaan ini mengacu pada perbedaan realisasi PAD yang dihasilkan dengan belanja yang dikeluarkan. . Pemerintah kabupaten dalam hal ini jauh lebih efisien, hal ini dikarenakan output atau belanja daerah yang digunakan dibawah dari input atau pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan atau proyek yang dilaksanakan.

Namun berbeda dengan pemerintah kota dimana meskipun lebih besar dalam menghasilkan input atau pendapatan namun biaya atau output yang keluar untuk membiayai kegiatan didaerah tersebut lebih besar sehingga dianggap kurang efisien. Jika input atau pendapatan yang dihasilkan terlampau besar ketika kegiatan tersebut terlaksana maka itu tidak sesuai dengan prinsip efisiensi dalam ekonomi. Contohnya pada Kota Pekanbaru pada tahun 2015 dengan rasio efisiensi sebesar 122,69% dimana meskipun pendapatan yang dihasilkan lebih besar namun belanja yang dikeluarkan jauh lebih tinggi. Sedangkan kegiatan dapat dikatakan efisien jika menghasilkan hasil yang baik dengan pengeluaran yang minimal.

4. Perbedaan Belanja Operasi Kabupaten dan Kota

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa rasio belanja operasi antara Pemerintah Daerah Kota dan Pemerintah Daerah Kabupaten terdapat perbedaan. Temuan pada studi ini mendukung studi oleh Gilang Sofyan Purnomo *et all*. Pada temuan penelitian tersebut menyebutkan adanya kesenjangan belanja operasi pada keuangan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.

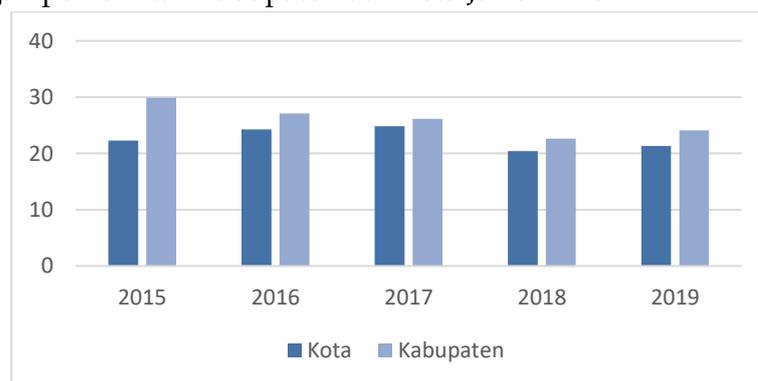


Gambar 4. Rata-Rata Rasio Belanja Operasi.

Berdasarkan rata rata hasil rasio belanja operasi dari tahun 2015 sampai 2019, dapat diketahui bahwa baik pada pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota mengalokasikan belanja daerah pada belanja operasi lebih dari 70% dimana biasanya belanja operasi pada total belanja hanya sekitar antara 60 sampai 90%. Namun jika dibandingkan pemerintah daerah kota jauh banyak mengalokasikan belanja operasi dibandingkan dengan pemerintah kabupaten. Perbedaan alokasi pada biaya operasional antara pemerintah kabupaten dan kota mengacu pada besaran belanja pegawai, seperti tunjangan tambahan penghasilan. Contohnya seperti pada Kota Banda Aceh dengan presentase belanja operasi sebesar 90,37% yang mengalokasikan belanja operasi dimana belanja operasi lebih banyak dialokasikan pada belanja pegawai. Perbedaan alokasi ini lebih banyak terjadi pada alokasi belanja pegawai. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 Pasal 58 ayat 1 tentang pengelolaan keuangan daerah menegaskan bahwa “Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Selain itu juga terdapat perbedaan tunjangan kemahalan dan juga kinerja yang menyebabkan terjadinya perbedaan alokasi belanja operasi antara pemerintah kota dan pemerintah kabupaten.

5. Perbedaan Belanja Modal Kabupaten dan Kota

Hipotesis kelima menyatakan bahwa rasio belanja modal antara Pemerintah Daerah Kota dan Pemerintah Daerah Kabupaten terdapat perbedaan. Kesimpulan penelitian ini mendukung penelitian Sumitro (2020). Menurut hasil tersebut, kegiatan belanja modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota Jawa Timur.



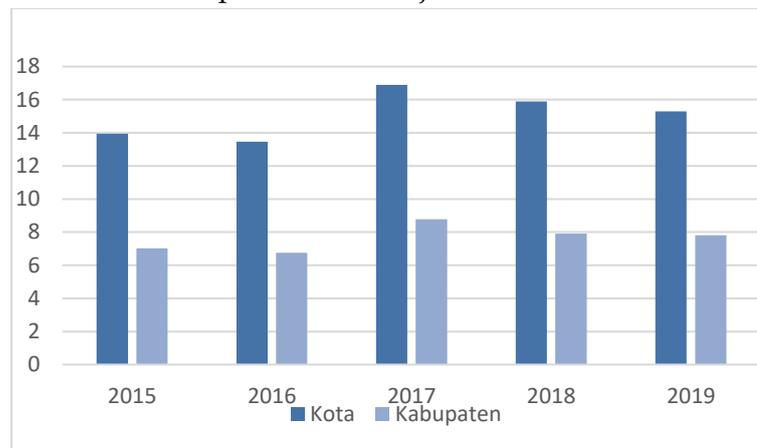
Gambar 5. Rata-Rata Rasio Belanja Modal.

Berdasarkan rata rata rasio belanja modal pada tahun 2015 sampai 2019, dapat dilihat bahwa pemerintah kota dan kabupaten mengalokasikan belanja modal lebih dari 20% dimana dimana proporsi belanja modal terhadap belanja daerah biasanya berkisar 5 sampai 20%. Hasil pada penelitian ini menyimpulkan bahwa proporsi alokasi belanja modal pemerintah kabupaten di Pulau Sumatera lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah daerah kota. Besarnya proporsi ini pada pemerintah kabupaten dikarenakan untuk dialokasikan kepada pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan kepada

masyarakat. Seperti pada rasio belanja modal tertinggi yaitu pada Kabupaten Lampung Barat dengan presentase rasio belanja modal sebesar 36,71%. Dalam situasi ini, belanja modal sebagian besar digunakan untuk membangun jalan, sistem irigasi, dan jaringan, dengan rencana kerja seperti membangun jalan dan jembatan, serta kegiatan untuk membangun serta mengelola jaringan irigasi dan rawa, dimana tujuan pemekaran daerah yaitu berguna untuk mempercepat serta meningkatkan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Pada daerah yang melakukan pemekaran maka belanja modal yang digunakan lebih banyak dikarenakan untuk meningkatkan pembangunan dan infrastruktur daerah tersebut. Pemekaran kabupaten dan kota di Pulau Sumatera sejak tahun 1999 telah melakukan pemekaran sebanyak 69 untuk kabupaten dan 14 untuk kota.

6. Perbedaan Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten dan Kota

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa rasio derajat desentralisasi fiskal antara Pemerintah Daerah Kota dan Pemerintah Daerah Kabupaten terdapat perbedaan. Temuan penelitian ini mendukung temuan penelitian dari Gilang Sofyan Purnomo *et all*. Hasil penelitian ini memperlihatkan terdapat perbedaan Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia pada rasio derajat desentralisasi fiskal.



Gambar 6. Rata-Rata Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal.

Rata-rata derajat desentralisasi fiskal dari tahun 2015 hingga 2019 berdasarkan kriteria pengukuran pada pemerintah kota berada pada presentase kurang yaitu berada dibawah 20% sedangkan pemerintah kabupaten berada pada presentase sangat kurang yaitu kurang dari 10%. Namun presentase PAD pada total pendapatan pemerintah kota lebih banyak yang artinya keterlibatan PAD di kota lebih tinggi dibanding pemerintah kabupaten. Perbedaan kinerja derajat desentralisasi fiskal ini mengacu pada besarnya kontribusi PAD terhadap pendapatan. Pemungutann PAD seperti pajak dan retribusi yang diterima lebih banyak di daerah kota dapat meningkatkan desentralisasi fiskal pemerintah kota sehingga lebih tinggi daripada pemerintah kabupaten Selain itu tingkat ekonomi dan sosial juga mempengaruhi dalam pemerintah menghasilkan pendapatan asli daerah yaitu dimana daerah perkotaan merupakan kawasan industri dan jasa dimana bisnis banyak sekali berkembang sehingga pajak dan retribusi yang diterima lebih tinggi dari daerah kabupaten. Seperti pada Pemerintah Kota Batam dimana partisipasi PAD mencapai 45,96% dari total pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah yang tinggi ini disebabkan tingginya pajak yang dihasilkan. Tingginya pajak ini disebabkan Kota Batam yang merupakan kawasan industri sekaligus kawasan pelabuhan yang letaknya strategis di jalur maritim internasional yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia, sehingga menghasilkan biaya pajak yang tinggi.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan pada penitian ini terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio kemandirian, efisiensi, belanja operasi, belanja modal dan derajat desentralisasi fiskal berdasarkan hasil uji hipotesis antara Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Pulau Sumatera Tahun 2015-2019. Hal ini dikarenakan tingginya kontribusi PAD dan rendahnya ketergantungan pendapatan transfer pada pemerintah kota dibandingkan pemerintah kabupaten selain itu pengeluaran pemerintah kota lebih besar dibandingkan

penerimaannya sehingga dianggap kurang efisien, namun berbeda dengan pemerintah kabupaten dimana pengeluaran tidak lebih besar daripada realisasi PAD sehingga pemerintah kabupaten dianggap efisien dalam mengelola keuangan daerah. Sedangkan pada rasio efektivitas terdapat perbedaan antara Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Pulau Sumatera Tahun 2015-2019, hal ini dikarenakan baik pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten dapat membuat realisasi PAD jauh lebih besar daripada yang dianggarkan sehingga dapat memberikan efektivitas pada keuangan daerah.

Terdapat beberapa saran dari penulis untuk penelitian selanjutnya dan pemerintah daerah yaitu:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan studi ini di rentang waktu yang berbeda dan memperbesar sampel penelitian sehingga menghasilkan penelitian yang jauh lebih luas dan beragam.
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk mampu menggunakan alat pengukuran analisis penilaian kinerja keuangan lainnya seperti analisis pertumbuhan, kemampuan keuangan daerah, analisis varians, analisis regresi dan analisis keuangan lainnya.
3. Sebaiknya pemerintah baik kota maupun kabupaten diharapkan untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah dengan cara mengoptimalkan pemungutan PAD dengan baik sehingga kontribusi PAD jauh lebih besar dibandingkan dengan pendapatan transfer sehingga dapat meningkatkan kemandirian daerah.
4. Bagi pemerintah daerah dapat memperbesar alokasi belanja modal untuk penyediaan sarana pelayanan publik sehingga dapat meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2005). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Erlangga.
- Dwi Asri, J. (2016). Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2013. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 1021-1034.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik* (3rd ed.). Salemba Empat.
- Halim, A. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah* (Ketiga). Salemba Empat.
- Hastuti, P. (2018). *Desentralisasi fiskal dan stabilitas politik dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah di indonesia*. 784-799.
- Jensen, Michael C; Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Jumame, F. (2016). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Dan Pemerintah Kota Sorong Periode 2012-2016 Farley. *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen*, 6, 63-80.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Edisi Kedu). Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Edisi Keti). Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahsun, M. (2013). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik* (BPFE-Yogyakarta (ed.); Pertama).
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi sektor publik*. Andi.
- Mengkuningtyas, Y. (2015). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten Di Indonesia Sebelum Dan Setelah Pemekaran. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 4(1).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Peraturan Dalam Negeri.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Purnomo G.S., K. A. (2019). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Antara Pemerintah Kabupaten Dan Pemerintah Kota (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia). *ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari - Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*, 53(9), 1689-1699.
- Prawirosetoto. (2002). Desentralisasi Fiskal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2.
- Salamun, S. (2007). *Analisis Laporan Keuangan Daerah*. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
- Saragih, J.P. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonom*. Jakarta. Ghalia Indonesia.

- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sumitro. (2020). PERBEDAAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAN PEMERINTAH KOTA DI JAWA TIMUR. *Jurnal Mitra Manajemen*, 4(11), 1651-1663.
- Taufik. (2017). ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTA SE-SUMATERA. 7(1), 993-1012.
- Tuti Meutia. (2021). PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR. 5(1), 31-44.
- Undang-undang No. 22 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah
- Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
- Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Yadnyana, I. K. (2013). *Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota Kawasan Metropolitan Sarbagita Tahun Anggaran 2007-2011 Fakultas Ekonomi Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia. 1, 92-108.*
- Zulkarnain M., Astuti Y., Krisniawati., M. (2016). *Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi. 4(2), 1021-1034.*